



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

I. DATA PRIBADI

- Nama** : MARTINUS
- Jabatan** : WAKIL KETUA BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN
- NHK** : 876003

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** 1.735.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/184 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/36 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
- Tanah Seluas 183 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 348 m2/45 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/36 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** 100.200.000

- MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 78.550.000
- MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 4.250.000
- MOTOR, BENELLI SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 17.400.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** 55.120.000

D. SURAT BERHARGA **Rp.** ----



E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 11.194.974

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.901.514.974

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.901.514.974

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.